

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DENGAN  
STATUS GIZI STUNTING DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MOROWALI**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh  
Ashar Ma'ruf  
NIM 22.C2.0039

Kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIKA SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

## ABSTRAK

Permasalahan *Stunting* di Indonesia merupakan permasalahan nasional. Di Kabupaten Morowali jumlah *stunting* tahun 2021 berjumlah 569 anak dan pada tahun 2022 berjumlah 647 anak yang *stunting*. Hal ini diakibatkan karena belum maksimalnya pelayanan kesehatan bagi anak *Stunting*. Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum pada anak stunting dalam pemenuhan layanan kesehatan dan menjelaskan tentang implementasi kebijakan perlindungan hukum pada anak stunting dalam pemenuhan layanan kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Data primer didapatkan dari studi lapangan dengan melakukan wawancara dan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Populasi pada penelitian tersebut sebanyak 11 Puskesmas. Sampel sebanyak 2 Puskesmas yaitu Puskesmas bahodopi dan Puskesmas Fonusingko.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kabupaten morowali sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Percepatan penurunan Stunting dengan melakukan program edukasi, PMT,Kunjungan Rumah. Namun, implementasi dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi anak *Stunting* belum maksimal. Sehingga Peraturan daerah perlu dipertegas lagi yang lebih khusus dengan memuat aturan hak dan kewajiban anak penderita *stunting*, hak dan kewajiban orang tua, profesionalisme pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanganan *stunting*, peran serta masyarakat, sarana dan prasarana, pengawasan dan sanksi hukum kepada petugas kesehatan, masyarakat, maupun terhadap orang tua yang mengabaikan kewajibannya yang mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi. Hambatan yang didapatkan yaitu pengetahuan ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi saat hamil, kebijakan secara teknis dalam mengatur pemenuhan pelayanan kesehatan bagi anak *Stunting*, kurangnya koordinasi antara pimpinan dan petugas Kesehatan untuk menurunkan *Stunting*.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Anak, Stunting

